



INDONESIAINDICATOR

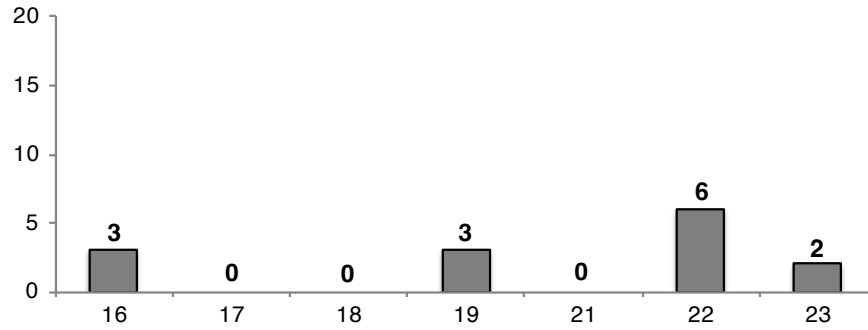
LAPORAN MEDIA CETAK

**Wakil Gubernur Jawa Tengah
(23 Mei 2025)**

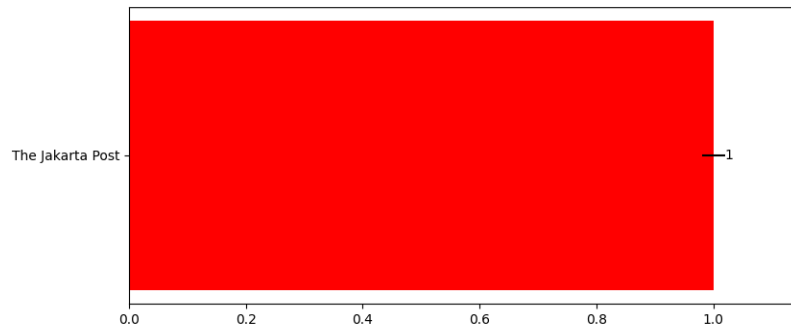
Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	2	2	0	0

Daily Statistic



Media Share



Influencers

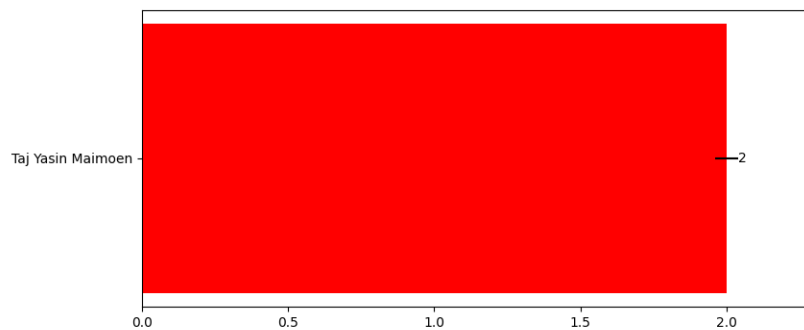


Table Of Contents : 23 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	23 Mei 2025	The Jakarta Post	Floods continue in Grobogan, Demak	3	Positive	Taj Yasin Maimoen
2	23 Mei 2025	Jateng Pos	Perempuan dan Anak di Jateng Rentan dalam Perceraian	12	Positive	

Title	Floods continue in Grobogan, Demak		
Media	The Jakarta Post	Reporter	Nina A. Loasana
Date	2025-05-23	Tone	Positive
Page	3	PR Value	

Floods continue in Grobogan, Demak

Nina A. Loasana

The Jakarta Post/Jakarta

Widespread flooding has submerged thousands of homes in Grobogan and neighboring Demak regency in Central Java over the past six days, triggered by multiple breaches in river embankments in both regions last week.

A torrential downpour that hit Grobogan regency on May 16 caused the Rengong and Klitek rivers to overflow, damaging a 20-meter section of the river embankment in Sukorejo village, Tegowano district, the next day.

Floodwaters, ranging from 50 centimeters to 150 cm, inundated 12 villages across five districts, including Sukorejo, Tanggirejo, Medani, Sugihmanik, Tungu, Latak and Manggarmas.

The disaster affected 1,200 people and forced 255 of them to seek refuge in temporary shelters. As of Thursday morning, approximately 200 evacuees remained in the shelters.

This ongoing flooding marks the third major flood caused by river embankment breaches in Grobogan regency. A similar disaster occurred on Jan. 20 when the embankment in Tutang village, Baturagung, failed, followed by another on March 8, when torrential rains caused embankments to breach at three separate locations.

During a visit to assess the flooding in Tanggirejo village on Wednesday, West Java Deputy Governor Taj Yasin Maimoen stressed the importance of a comprehensive strategy to address the region's recurring floods.

"In the past, it took seven hours for water from upstream to reach this village after heavy rainfall, but now it takes only two hours. This indicates significant environmental damage in the upstream areas," he said.

He said that the government will soon begin dredging and widening rivers in Grobogan, as well as reinforcing and upgrad-



Antara/Aprilio Akbar

Knee-deep flood: A resident pushes her bicycle through floodwaters on Tuesday at Ngloodon hamlet in Kembangan village, Demak regency, Central Java. The Demak Disaster Mitigation Agency (BPBD) reported that the flooding was caused by two breaches in the Tuntang River embankment.

ing the river embankments that are in a "critical condition".

Authorities will also encourage local residents to plant trees with deep roots in upstream areas, while advising against planting cassava and banana trees along riverbanks, as these are easily washed away during floods, exacerbating the damage.

In addition, the government plans to install early warning systems along rivers in Grobogan regency to help alert residents to potential flooding.

Flooding also struck Demak regency on May 18 after heavy rain caused the Tuntang River to overflow, breaching embankments in Karangrejo and Kembangan villages in Bonang District.

The floodwaters quickly spread across at least 11 villages in the regency, including Ploso village in Karangtengah district, Lempuyang village in Wonosalam district, Sidoharjo village in Guntur district and Mintreng village in Kebonagung district, with water levels reaching over 100 cm.

According to data from the Central Java Disaster Mitigation Agency (BPBD), more than 11,600 people were affected by the floods. The flooding also submerged 270 hectares of farmland, 15 schools, 18 public

facilities and three healthcare centers.

Authorities are working around the clock to repair the damaged river embankments and have deployed dozens of water pumps to remove floodwater from residential areas. As of Thursday, repair efforts are 70 percent complete.

Last year, Demak experienced another devastating flood after an embankment on the Wulan River collapsed. The floodwaters, reaching three meters in height, submerged thousands of homes, inundated intercity roads and displaced over 20,000 people.

Demak Regent Eisti'anah explained that Demak lies downstream of several major rivers, making it highly susceptible to flooding.

"We are taking steps to prevent recurring floods by repairing embankments that are in critical condition and dredging and widening the rivers," she said on Wednesday, as quoted by *Kompas*.

However, she acknowledged that limited funding presents a significant challenge to the region's flood mitigation efforts. Despite this, local authorities are working closely with the central government to implement long-term solutions.

Title	Perempuan dan Anak di Jateng Rentan dalam Perceraian		
Media	Jateng Pos	Reporter	rit/jan
Date	2025-05-23	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Perempuan dan Anak di Jateng Rentan dalam Perceraian



Wagub Jateng Taj Yasin setelah MoU dengan sejumlah pihak untuk penangan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

Pemprov MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama, Polda, dan 17 Stakeholder

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Upaya Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Polda Jateng dan 17 Stakeholder di Gedung Grhadika Bakti Praja, Kamis (22/05/2025).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen mengatakan, Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, melalui Peraturan Daerah yang diterbitkan. Sejumlah Perda antara lain Perda Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga.

"Pemprov Jateng menyambut baik kesepakatan yang dilaksanakan tentang upaya perlindungan perempuan dan anak ini, masih banyak kasus yang belum terungkap di tengah masyarakat persoalan karena ada yang menganggap sebagai hal yang tabu untuk disampaikan,"

urair Wagub dalam sambutannya.

Terbitnya Perda maupun dilaksanakannya MoU, kata Wagub, belum cukup jika tidak mendapatkan dukungan semua pihak. Oleh karenanya, dia mengajak stakeholder dan pihak yang hadir dalam MoU tersebut untuk turun di tengah masyarakat dan mendengarkan masalah perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Selama ini, banyak aksi terkait perlindungan perempuan dan anak, namun lebih banyak dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Sedangkan, desa juga memiliki persoalan yang tidak kalah beragam dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

"Karena itu lah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program Kecamatan Berdaya yang akan menjadi penggerak upaya perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia hingga tingkat desa dan kecamatan," terang Wagub.

Dalam keterangannya se usai acara, Wagub mengapresiasi MoU yang dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah, sebagai upaya penunjang program pemerintah lima tahun mendatang. Melalui Program Kecamatan Berdaya, upaya tersebut dapat terwujud, termasuk dengan menggandeng stakeholder dan perguruan tinggi.

"Tentu saja 17 stakeholder yang hadir dalam MoU ini akan terlibat, dan bahkan lebih luas lagi juga akan menggandeng 40 perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah untuk bersama-sama mewujudkan Kecamatan Berdaya," tandasnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr Zulkarnain men-

gatakan, pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi sendiri dalam hal realisasi putusan terhadap akibat perceraian yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Penandatanganan MoU tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan dirumuskan melalui aplikasi JamuKuat yang merupakan layanan informasi hukum pengadilan agama.

Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung H Busra yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan akses perempuan dan anak, serta memastikan hak-haknya selama proses peradilan. Diakui jika perempuan dan anak adalah kaum rentan terhadap diskriminasi, sehingga pengadilan agama berperan penting dalam sistem peradilan inklusif.

Selain Pemprov, Pengadilan Tinggi Agama, dan Polda 17 lembaga yang turut serta dalam penandatanganan tersebut yaitu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Kepala Kementrian Hukum, Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Ketua DPD MAPPI Jawa Tengah, EVP PT Pos Indonesia Regional IV Jateng dan DIY, Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Regional VII Semarang, Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Rektor Universitas Sultan Agung Semarang. (*/rit/jan)